

## DAFTAR PUSTAKA

BPS.go.id

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan. 2014. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

Ghazali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.

Badan Penerbit : Universitas Diponegoro. Semarang.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Penerbit :

Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit :

Andi, Yogyakarta.

Maryani. "Pengaruh Investasi Permanen dan Aset Tetap terhadap Pendapatan

Asli Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai Variabel

Intervening". Thesis S2 Universitas Lampung. 2010.

Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di

Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP

YKPN.

Nirzawan. 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan

Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta :

UPP YKPN.

Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non

Laba. Penerbit : Mitra Wacana Media.

- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta. Penerbit : Ghalia Indonesia.
- Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- , 2000. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- , 2000, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Otonomi Daerah.
- , 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- , 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- , 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.